

## **Bab I   Pendahuluan**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran mengenai topik penelitian yang akan disajikan dan mengapa penelitian perlu dilakukan.

### **I.1   Latar Belakang**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini tertera pada pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE. Dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi terdapat faktor yang menjadi hambatan atau risiko seiring dengan berjalannya proses yaitu berasal dari personil, proses, dan teknologi yang ada pada perusahaan atau organisasi.

Salah satu risiko yang muncul dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi yaitu risiko proyek. Risiko Proyek merupakan kejadian yang tidak tentu, jika terjadi akan memiliki efek positif dan negatif terhadap tujuan proyek. Baik berupa biaya, waktu, mutu, dan ruang lingkup. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi harus dikelola dengan baik agar sesuai dengan tujuan SPBE. Manajemen risiko proyek merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah risiko proyek yang terjadi pada perusahaan atau organisasi. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi risiko-risiko yang muncul dalam proyek dengan melakukan penilaian risiko menggunakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 yang telah mengadopsi dari kerangka kerja COBIT 5 *for Risk* dan ISO 31000:2018.

Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di kabupaten bandung. Pemerintah menyadari pentingnya peran *e-Government* untuk mendukung semua sektor pembangunan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hasil studi lapangan melalui wawancara Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki 113 aplikasi yang dikelola perangkat daerah pemerintah kabupaten bandung. Aplikasi ini terbagi atas jumlah aplikasi disetiap perusahaan daerah (PD). Pemerintah Kabupaten Bandung juga memiliki 23 aplikasi inti dan aplikasi generik yang belum dikelola dengan baik sehingga layanan untuk masyarakat menjadi terhambat atau aplikasi usang maupun duplikasi aplikasi yang menyebabkan munculnya risiko atau dampak yang buruk bagi Pemerintah Kabupaten Bandung. Aplikasi-aplikasi tersebut dijelaskan pada tabel I.1 berikut.

**Tabel I.1 Daftar Aplikasi Pemerintah Kabupaten Bandung**

<b>Nama Perusahaan Daerah</b>	<b>Jumlah Aplikasi</b>
Dinas Kesehatan	23
DPMPTSP	2
Satpol PP	2
BAPEDA	9
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2
DISHUB	4
DISPUSIP	4
DPMD	5
BKD	6
DISPARBUD	2

<b>Nama Perusahaan Daerah</b>	<b>Jumlah Aplikasi</b>
DISPERIN	1
Dinas PUPR	5
Dinas Lingkungan Hidup	4
RSUD Majalaya	6
BPBD	1
Dinas Pendidikan	3
RSUD Soreang	2
Disnaker	1
DP2KBP3A	4
Disdukcapil	5
Diskominfo	4
Diskop-UKM	2
Dispakan	2
Bagian Organisasi	3
Bagian Hukum	1
BKPPD	5
Bagian Barang Jasa	3
<b>Total</b>	<b>113</b>

**Sumber : Daftar Aplikasi Pemerintah Kabupaten Bandung**

Pada tabel I.1 merupakan daftar aplikasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki tugas untuk mengotomatisasi semua pelayanan publik demi mewujudkan tujuan SPBE. Dimana Pemerintah Kabupaten Bandung menyediakan pelayanan publik secara online. Dengan banyaknya aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dapat menimbulkan risiko-risiko yang dapat menghambat pelayanan karena kurangnya pertimbangan kualitas dan kuantitas atas aplikasi yang telah dibuat serta risiko negatif yang muncul selama proses tersebut sehingga dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi organisasi dan menghambat proses bisnis dalam organisasi.

Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa pentingnya perancangan manajemen risiko proyek pada Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meminimalisir risiko yang ada serta mewujudkan tujuan dari SPBE. Permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir atau bahkan diperbaiki dengan menggunakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 yang telah mengadopsi dari kerangka kerja COBIT 5 *for Risk* dan ISO31000:2018 untuk memperbaiki risiko yang muncul agar proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi, dan mengetahui risiko proyek agar proses dapat berjalan sesuai tujuan organisasi dan tujuan SPBE.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Pada sub-bab ini merupakan penjelasan mengenai arah penelitian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian.

1. Bagaimana hasil penilaian risiko sampai menghasilkan profil risiko proyek SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana hasil *risk treatment plan* pada risiko proyek SPBE di Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 ?
3. Bagaimana solusi maupun rencana penanganan risiko dari aspek personil, proses dan teknologi untuk menangani risiko proyek SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bandung ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Pada sub-bab ini merupakan penjelasan mengenai sesuatu yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan rancangan manajemen risiko proyek SPBE di Pemerintah Kabupaten Bandung yang sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020.
2. Menghasilkan *risk treatment plan* pada risiko proyek SPBE di Pemerintah Kabupaten Bandung menggunakan kerangka kerja COBIT 5 *for Risk*.

3. Menghasilkan rancangan solusi dari aspek personil, proses dan teknologi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menindaklanjuti *risk treatment*.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak. Manfaat penelitian dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi Pemangku Kepentingan, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mengoptimalkan nilai indeks kematangan SPBE di Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Bagi Organisasi, meningkatkan kinerja organisasi.
3. Bagi Peneliti, kegiatan penelitian ini merupakan penerapan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari selama kuliah kedalam penelitian.
4. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan dan wawasan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik.

#### **I.5 Batasan Masalah**

Pada sub-bab ini merupakan penjelasan mengenai batasan dalam penelitian. Batasan masalah dalam penelitian sebagai berikut.

1. Cakupan dalam lingkup penilaian perancangan Manajemen Risiko SPBE berdasarkan rencana proyek, Risiko Pemerintah Kabupaten Bandung dalam penerapan SPBE, Regulasi berdasarkan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020.
2. Hasil dari penelitian perancangan Manajemen Risiko SPBE ini adalah berdasarkan hasil analisis risiko berdasarkan tahapan proses pada standar ISO 31000.
3. Penelitian perancangan Manajemen Risiko SPBE dibatasi menggunakan kerangka kerja COBIT 5 *for Risk*.
4. Perancangan manajemen risiko hanya berfokus pada risiko proyek.
5. Penelitian ini dilakukan sampai tahap perancangan dan pemberian dokumen rekomendasi.

## **I.6 Sistematika Penelitian**

Pada sub-bab ini merupakan penjelasan mengenai gambaran singkat mengenai penelitian. Sistematika penelitian adalah sebagai berikut.

### **BAB I       Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II       Kajian Teori**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori penunjang yang akan digunakan dalam penyelesaian penelitian.

### **BAB III      Metodologi Penelitian**

Pada bab ini menjelaskan langkah-langkah penelitian secara rinci meliputi: tahap identifikasi, tahap analisis, tahap perancangan, tahap pelaporan, serta kesimpulan dan saran.

### **BAB IV      Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data**

Pada bab ini berisi analisis dan pembahasan mengenai penilaian yang dilakukan dengan berbasis COBIT 5 *for Risk*.

### **BAB V       Perancangan**

Pada bab ini berisi perancangan kebijakan, prosedur dan perancangan solusi yang menjadi rekomendasi bagi perusahaan dengan berbasis COBIT 5 *for Risk*.

### **BAB VI      Penutup**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh kegiatan penelitian dan saran untuk penelitian.